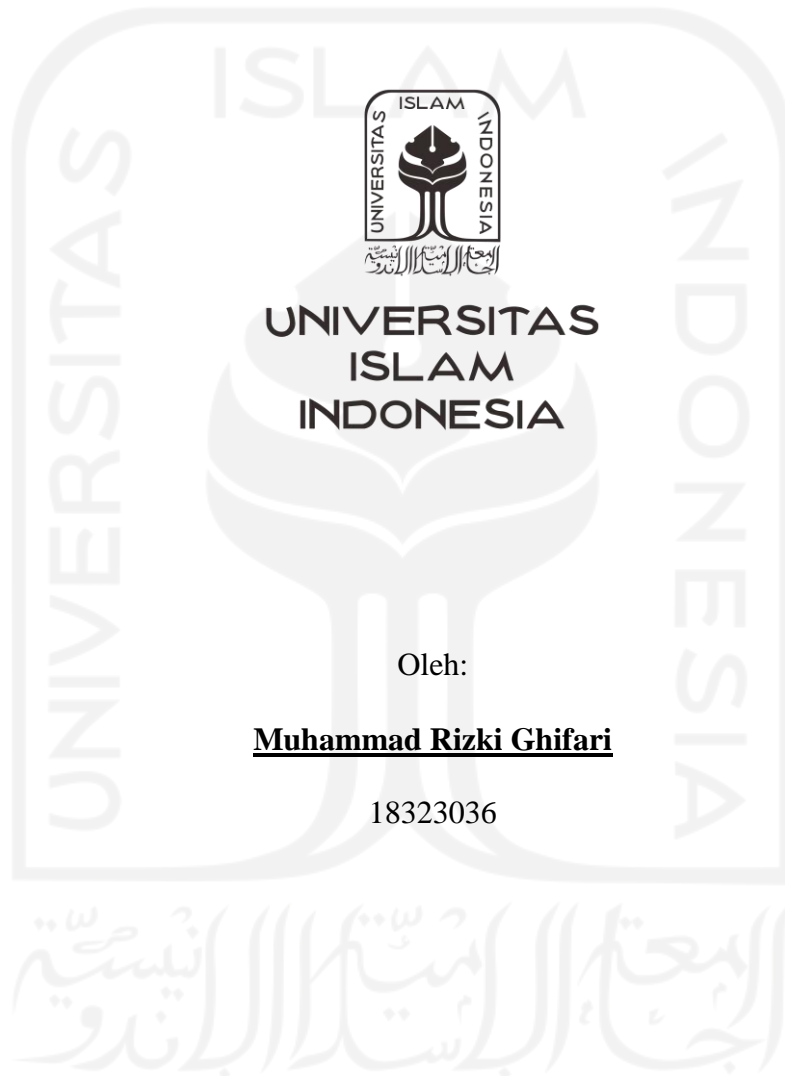


**Feminisme Liberal Politik Luar Negeri Australia:  
Studi Kasus Masa Kepemimpinan Julia Gillard 2010-2013**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Muhammad Rizki Ghifari**

18323036

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**Feminisme Liberal Politik Luar Negeri Australia:  
Studi Kasus Masa Kepemimpinan Julia Gillard 2010-2013**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Muhammad Rizki Ghifari**

18323036

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Feminisme Liberal Politik Luar Negeri Australia:  
Studi Kasus Masa Kepemimpinan Julia Gillard 2010-2013**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

14 Juli 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi




Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

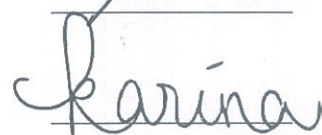
Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.


Tanda Tangan

---

---

---

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 20 Juni 2022,*



---

*Muhammad Rizki Ghifari*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR</b>	vii
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	5
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	6
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	9
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	15
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	16
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	16
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	17
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	17
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	17
<b>BAB II</b>	19
<b>2.1 Politik Faksional Partai Buruh: Julia Gillard dan Suksesi Perdana Menteri Australia Tahun 2010</b>	20
<b>2.2 Serangan Terhadap Pemerintahan Gillard</b>	26
<b>2.3 Konflik Internal Partai Buruh</b>	30
<b>BAB III</b>	34
<b>3.1 Analisis Politik Luar Negeri Australia pada Masa Kepemimpinan Julia Gillard dari Sudut Pandang Feminisme Liberal</b>	34
3.1.1 <i>Women and Individualism: Mempromosikan Pengakuan yang Lebih Besar terhadap Nilai Perempuan secara Individu</i>	35
3.1.2 <i>Equality of Opportunity: Mendapatkan Kesempatan yang Sama bagi Perempuan dalam Ekonomi dan Pendidikan</i>	38
3.1.3 <i>Equality of Legal Rights: Mendapatkan Keadilan dalam Hukum atau Kebijakan</i>	39

3.1.4. <i>Education and Reform: Menggunakan Pendidikan sebagai Alat Utama dalam Reformasi Sosial</i>	41
3.1.5. <i>Nationalism and Masculinity</i> (Enloe 2014)	42
<b>BAB IV</b>	46
4.1 Kesimpulan	46
Tabel 1.	47
4.2 Rekomendasi	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	51



**DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR**

**Tabel 1.** Implementasi Feminisme Liberal dalam Politik Luar Negeri Australia  
Periode Kepemimpinan PM Julia Gillard Tahun 2010-2013



## ABSTRAK

Australia menuliskan sejarah baru dengan terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di negaranya. Selama masa kepemimpinannya, Gillard mendapatkan banyak kritik hingga serangan yang ditujukan kepada dirinya. Politik domestik memiliki peran dalam pembuatan politik luar negeri, sehingga penting untuk mengetahui politik domestik Australia sebelum melihat politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Gillard. Teori feminisme liberal digunakan sebagai kaca mata dalam melihat politik luar negeri Australia selama masa pemerintahannya. Lalu, menggunakan variabel *nationalism and masculinity* guna melihat konteks negara. Politik luar negeri Australia selama masa kepemimpinan Gillard, merupakan politik luar negeri yang memiliki unsur-unsur dari komitmen politik feminisme liberal. Salah satu contohnya adalah AusAID pada masa kepemimpinan Gillard, program AusAID pada masa tersebut berfokus pada isu kesetaraan gender. Adapun kebijakan seperti *Australia in the Asian Century White Paper*, yang memperlihatkan nilai-nilai feminisme di dalamnya karena Australia memposisikan dirinya sebagai negara yang terbuka untuk bekerja sama, alih-alih menjadi negara yang mencerminkan nilai maskulinitas.

**Kata Kunci:** Australia, Julia Gillard, Feminisme Liberal, Politik Luar Negeri

## ABSTRACT

*Australia made a new history with the election of Julia Gillard as the country's first female Prime Minister. During her leadership, Gillard received a lot of criticism and attacks directed at her. Domestic politics has a role in the making of foreign policy, so it is important to know Australian domestic politics before looking at Australian foreign policy during Gillard's period. Liberal feminism theory was used as a lens in viewing Australian foreign policy during her period. Then, using the variables of nationalism and masculinity to see the context of the country. Australia's foreign policy during Gillard's leadership was a foreign policy that had elements of a liberal feminism political commitment. One example is AusAID during Gillard's leadership, the AusAID program at that time focused on gender issues. As for policies such as Australia in the Asian Century White Paper, which describes the values of feminism in it because Australia positions itself as a country that is open to cooperation, instead of being a country that reflects masculinity values.*

**Keywords:** Australia, Julia Gillard, Liberal Feminism, Foreign Policy



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Isu kesetaraan gender atau *gender equality* menjadi salah satu isu yang sering diperbincangkan sedari dulu hingga sekarang, baik dari level global maupun negara. *Gender equality* sendiri merupakan gagasan yang dapat diperdebatkan, tergantung dengan topik yang ingin dibahas seperti budaya, politik, hukum, maupun agama. Banyak orang yang mengaitkan kesetaraan gender dengan hal-hal yang berbeda-beda (Nyhagen and Halsaa 2016). Banyak orang hingga institusi internasional seperti PBB, menginginkan dan mengupayakan adanya kesetaraan gender yang mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki (UN Women: Gender Mainstreaming n.d.). Namun, banyak juga yang memandang sepele mengenai masalah ini dan bahkan menjadi aktor yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender (Holmgren and Hearn 2009).

Diskriminasi terhadap perempuan sering kali terjadi pada banyak bidang seperti politik, pekerjaan, kesehatan, olahraga, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Dengan masih banyaknya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang dan bentuk seperti *catcalling*, kesenjangan upah yang didasari gender, pelecehan seksual, hingga cibiran terhadap perempuan yang bersifat *sexist* di dunia politik membuat masalah ini menarik untuk dibahas, seperti yang terjadi di Australia, yang di mana politik ibarat racun bagi perempuan Australia (Mao 2019).

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), isu-isu kesetaraan gender dan politik luar negeri dari berbagai negara seringkali dijadikan sebagai bahan diskusi dan pembahasan. Jika berbicara mengenai kesetaraan gender, maka tidak lepas dengan salah satu teori dalam studi HI yaitu feminisme yang memiliki aliran seperti feminisme liberal, yang berhubungan dengan isu-isu kesetaraan gender. Asumsi dasar dari teori feminisme itu sendiri adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dari posisi yang *minor* atau kurang menguntungkan, dan juga keinginan untuk mewujudkan kesetaraan (Wollstonecraft 1792), sedangkan pada aliran feminisme liberal memiliki dasar pemikiran seperti prinsip liberalisme yang mengutamakan kebebasan untuk setiap individu (Rokhmansyah 2016, Tong 2014). Melalui sudut pandang teori feminisme liberal, kita dapat melihat bagaimana pandangan mereka terhadap isu ketidaksetaraan gender yang terjadi, hingga upaya dan tujuan mereka dalam mewujudkan kesetaraan gender pada tingkat global melalui politik luar negeri.

Australia merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris, yang di mana mereka memiliki masalah mengenai isu kesetaraan gender, dan masalah ini sering kali muncul namun kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari dunia Internasional. Berdasarkan laporan Global Gender Gap Index yang dirilis oleh World Economic Forum untuk tahun 2020, Australia menempati peringkat ke-44 dilihat dari kerangka partisipasi ekonomi, capaian pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan politik (Global Gender Gap Report 2020), yang di mana posisi Australia terus menurun selama 14 tahun terakhir (Coggan 2020). Dengan keadaan dari laporan tersebut kita dapat melihat bagaimana kurangnya kesadaran pemerintahan Australia dalam mengupayakan kesetaraan gender dari tahun ke

tahun. Berangkat dari persoalan ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Australia berusaha memulihkan citranya pada tingkat internasional yang di mana terus menurun dalam konteks kesetaraan gender (ibid), terutama pada saat terpilihnya Perdana Menteri perempuan pertama mereka yaitu Julia Gillard.

Kembali ke tahun 2010 pada saat di mana Australia menuliskan sejarah baru dalam dunia politiknya dengan terpilihnya Perdana Menteri perempuan pertama bagi Australia, yaitu Julia Gillard dari Partai Buruh, menggantikan Perdana Menteri sebelumnya yang juga berasal dari Partai Buruh, yaitu Kevin Rudd. Kejadian tersebut banyak menuai kritik dan pendapat dari berbagai kalangan, tidak terkecuali media. Media menggambarkan naiknya Julia Gillard sebagai ‘seseorang pembunuh yang menusuk dari belakang’, karena prosesnya untuk menduduki kursi Perdana Menteri (Williams 2017). Namun pada waktu lain, saat Malcolm Turnbull naik menjadi Perdana Menteri Australia pada tahun 2015 dengan cara yang hampir serupa dengan Julia Gillard, ia tidak mendapatkan kritik seperti itu dan bahkan media menggambarkannya terlihat seperti ‘mengambil takhta kembali’ (ibid), yang di mana hal ini memberikan pandangan yang kurang baik kepada Julia Gillard saat ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Mary Crawford dan Barbara Pini (2010) dalam tulisannya menyatakan bahwa parlemen merupakan institusi yang sangat maskulin dan dibuat untuk didominasi oleh laki-laki (Crawford and Pini 2010). Dari pernyataan tersebut kita dapat melihat bahwa naiknya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia merupakan salah satu perwujudan kesetaraan gender, yang di mana merepresentasikan perempuan dalam dunia politik, ditengah adanya gambaran maskulinitas pada parlemen.

Ditengah peristiwa penggambaran media terhadap dirinya dan juga maskulinitas yang mengelilinginya di parlemen, Julia Gillard pada masa kepemimpinannya, terus menjalankan pemerintahan sebagai Perdana Menteri Australia. Berbicara mengenai kebijakan luar negeri Australia, tidak ada kerangka kerja mengenai kesetaraan gender yang menyeluruh pada masa kepemimpinan Kevin Rudd hingga masa kepemimpinan Julia Gillard (Rimmer and Sawyer 2016). Namun, terdapat adanya kemajuan dalam kesetaraan gender di Australia di bawah kepemimpinan Partai Buruh, yaitu pada masa kepemimpinan Kevin Rudd hingga Julia Gillard, dalam beberapa sektor kebijakan tertentu seperti kekerasan berbasis gender, pembayaran cuti orang tua, upah yang setara untuk perempuan, hingga sektor perdamaian dan keamanan (ibid).

Perjalanan politik Julia Gillard pada masa jabatannya sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia ditengah adanya maskulinitas dan *sexism* dalam parlemen Australia, memperlihatkan bagaimana perempuan masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan dalam dunia perpolitikan Australia. Hal tersebut dapat kita lihat pada masa kepemimpinan Julia Gillard tahun 2012 saat ia menyampaikan sebuah pidato yang dikenal sebagai pidato “*sexism* dan *misogyny*”, yang di mana dalam pidatonya, ia menyerang pimpinan oposisi pada saat itu dari partai liberal yaitu Tony Abbott, dengan mengatakan bahwa Tony Abbott merupakan seseorang yang *sexist* dan juga *misogyny* (Holland and Wright 2017). Dengan adanya peristiwa tersebut, pidatonya menjadi viral dan diakui oleh dunia internasional karena telah memperlihatkan sisi patriarki yang melekat dalam politik Australia (ibid).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin lebih mengetahui tentang bagaimana kebijakan luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard jika dilihat dari sudut pandang feminisme liberal, ditengah adanya budaya patriarki dalam parlemen Australia. Meskipun sudah ada penelitian mengenai kebijakan dan permasalahan-permasalahan gender pada masa pemerintahan Julia Gillard (Rimmer and Sawyer 2016, Holland and Wright 2017, Crawford and Pini 2010), namun belum memperlihatkan bagaimana kebijakan luar negeri Australia dilihat dari perspektif feminisme liberal. Oleh karena itu, penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai bagaimana Julia Gillard sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Perdana Menteri Australia terhadap membuat kebijakan luar negeri Australia selama masa pemerintahannya, mengingat bahwa parlemen merupakan institusi yang maskulin dan diperuntukkan untuk laki-laki (Crawford and Pini 2010), dan juga adanya tekanan berbasis gender dari dalam parlemen Australia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi politik luar negeri Australia masa kepemimpinan Julia Gillard dilihat dari perspektif feminisme liberal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui politik luar negeri Australia selama masa kepemimpinan Julia Gillard.

2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintahan Julia Gillard terhadap politik luar negerinya, di tengah adanya tekanan maskulinitas dalam parlemen Australia.
3. Untuk menganalisis kebijakan atau politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard melalui sudut pandang feminisme liberal.
4. Untuk mengetahui bagaimana teori feminisme liberal melihat politik luar negeri Australia selama kepemimpinan Julia Gillard sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Perdana Menteri Australia.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian mengenai analisis feminisme liberal pada politik luar negeri Australia ini akan berfokus pada masa kepemimpinan Julia Gillard (2010-2013), sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia. Penulis akan menganalisis bagaimana keadaan di dalam parlemen Australia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri perempuan, yang di mana adanya tekanan maskulinitas dalam parlemen yang kurang sehat untuk perempuan (Crawford and Pini 2010). Selanjutnya penulis akan memaparkan bagaimana feminisme liberal melihat politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard, dikarenakan pada masa kepemimpinannya, Julia Gillard sendiri mendapatkan berbagai macam kritik atau komentar dari parlemen sendiri, hingga media di Australia (Williams 2017).

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Sudah ada ditemukan beberapa studi tentang gambaran terhadap terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia. Seperti pada tulisan Blair Williams yang menulis dan melihat perbedaan pandangan media tentang terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia dengan Malcolm Turnbull, seperti penggambaran Julia Gillard sebagai ‘pembunuh dari belakang’ sedangkan Malcolm Turnbull yang digambarkan seperti orang yang ‘mengambil takhta kembali’, meskipun mereka memiliki cara atau proses yang cenderung sama dalam mencapai posisi tersebut (Williams 2017). Williams (2017) berpendapat bahwa kedua kejadian tersebut mengungkapkan bagaimana dinamika gender dari pergantian Perdana Menteri dan bagaimana media menjadikan gender sebagai senjata melawan perempuan (ibid). Dari tulisan Williams (2017), dapat kita lihat bagaimana adanya pandangan yang kurang baik dari media terhadap Julia Gillard pada saat ia terpilih sebagai Perdana Menteri Australia. Namun, dalam tulisannya, Williams (2017) belum menjelaskan bagaimana kondisi dalam parlemen dalam menyikapi naiknya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri. Sehingga penulis akan meninjau apa yang terjadi di dalam parlemen Australia.

Tidak hanya media, Crawford dan Pini (2010) dalam tulisannya membahas tentang bagaimana parlemen Australia merupakan institusi yang berbasis gender. Mereka berargumen bahwa kondisi sosial perempuan, kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik, dan kesulitan bagi perempuan untuk memiliki jalan yang panjang dalam dunia politik, dijadikan sebagai alasan kurangnya perempuan Australia untuk masuk ke parlemen (Crawford and Pini 2010). Perempuan dianggap bukan politisi, namun laki-laki adalah politisi, hal ini terbukti dalam pemilihan

umum yang di mana laki-laki lebih banyak dipilih dibandingkan perempuan karena dianggap lebih terlibat dalam jaringan kerja dan politik (ibid). Berangkat dari pernyataan Crawford dan Pini (2010), kita dapat melihat bahwa adanya pandangan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan di dalam parlemen Australia dapat mempengaruhi bagaimana jalannya pemerintahan. Namun dalam tulisannya, Crawford dan Pini (2010) kurang menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Australia selama kepemimpinan Julia Gillard. Sehingga penulis akan memaparkan bagaimana politik luar negeri Australia pada masa Julia Gillard selama masa kepemimpinannya dilihat dari sudut pandang feminisme liberal.

Lalu, dalam tulisannya, Donaghue (2015) membahas mengenai pidato Julia Gillard yang terkenal dengan sebutan '*sexism and misogyny speech*' di parlemen saat menjabat sebagai Perdana Menteri Australia yang dilihat oleh sebagian orang, ia hanya memainkan '*the gender card*'. Donaghue melihat bahwa adanya gagasan mengenai perempuan yang harus menghindari atau mengabaikan perlakuan *sexism* membuat munculnya perempuan yang memilih untuk menghadapi perlakuan *sexism* (Donaghue 2015). Dengan adanya perempuan yang memilih untuk menghadapi tindakan *sexism*, munculah frasa '*playing the gender card*' yang di mana frasa ini telah menjadi cara yang umum untuk mengabaikan perempuan yang membela dirinya atas perlakuan buruk yang dialami olehnya (ibid). Dari pernyataan Donaghue (2015), narasi '*playing the gender card*' difungsikan untuk menyangkal pembelaan perempuan, dan memperlihatkan bahwa sulit bagi perempuan di Australia untuk mendapatkan hak mereka. Donaghue (2015) dalam tulisannya, kurang menganalisa bagaimana sikap yang dilakukan Julia Gillard dalam '*playing the gender card*' tersebut dan bagaimana politik luar negeri Australia selama masa



kepemimpinan Julia Gillard. Sehingga penulis akan menjelaskan bagaimana politik luar negeri Australia yang dikeluarkan oleh pemerintahan Julia Gillard.

Dari studi atau literatur di atas, mereka telah membahas tentang bagaimana gambaran media dan parlemen terhadap terpilihnya Julia Gillard dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia. Namun, dari literatur-literatur tersebut diantaranya hanya berfokus kepada isu domestik dan gambaran media hingga parlemen, mengenai perempuan dan Julia Gillard yang sedang memimpin. Belum ada literatur yang menjelaskan bagaimana feminisme liberal melihat politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard dilihat dari sudut pandang feminisme liberal.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisis politik luar negeri Australia, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori feminisme liberal, sehingga pertama-tama kita harus memahami tentang feminisme liberal terlebih dahulu. Secara garis besar, teori feminisme liberal merupakan salah satu aliran dari feminisme itu sendiri yang mengandung nilai-nilai kebebasan atau liberalisme. Perlu diketahui bahwa liberalisme memiliki pandangan yang berbeda terkait campur tangan negara dalam lingkungan masyarakat yang dikenal sebagai liberal klasik dan juga liberal egaliter (Tong 2014). Liberal klasik menilai bahwa negara harus membatasi campur

tanggannya pada masyarakat guna melindungi kebebasan sipil (seperti hak milik, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat). Liberal klasik juga melihat bahwa negara seharusnya memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri. Di sisi lain, liberal egaliter berpendapat bahwa tidak hanya kebebasan sipil saja, negara juga harus berfokus pada kesenjangan ekonomi. Liberal egaliter juga melihat bahwa setiap individu memiliki bakat dan keberuntungan yang berbeda-beda, dan hal inilah yang menyebabkan setiap individu tidak mendapatkan haknya secara adil. Karena hal itu, liberal egaliter meminta intervensi negara dalam hal ekonomi (seperti subsidi sekolah, kupon makanan, perumahan murah, dan lainnya) (ibid).

Tong (2014) menyatakan bahwa meskipun gagasan liberal klasik maupun liberal egaliter muncul dalam pemikiran feminisme liberal, para feminis liberal kontemporer lebih mengacu pada pemikiran liberal egaliter. Pada mulanya, feminisme liberal merupakan teori yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk rasional yang sama atau setara dengan laki-laki (Wollstonecraft 1792). Namun pemikiran feminisme liberal terus bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini disertai oleh banyaknya tokoh-tokoh feminisme liberal seperti Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill dan Harriet Taylor, dan juga Betty Friedan yang mengutarakan pendapatnya melalui tulisan-tulisan mereka.

Wollstonecraft pada abad ke-18, melalui tulisannya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* menyampaikan mengenai bagaimana perempuan pada zamannya tidak mendapatkan kebebasan yang seharusnya mereka dapatkan. Perempuan tidak diperbolehkan untuk memutuskan keinginannya sendiri (ibid). Secara rasional, Wollstonecraft menegaskan bahwa perempuan juga

memiliki kesempatan pendidikan maupun ekonomi yang sama dengan laki-laki selayaknya manusia, sehingga mereka bisa membentuk kepribadian mereka masing-masing dan juga berhak memutuskan keinginannya sendiri (Tong 2014). Kesempatan tersebut dapat diartikan dengan perempuan harus mendapatkan pendidikan yang layak sama dengan laki-laki, begitupun dengan kesempatan ekonomi yaitu perempuan juga berhak untuk memiliki pekerjaan guna memenuhi keinginannya sendiri. Singkatnya, Wollstonecraft dalam Tong (2014) menginginkan perempuan menjadi dirinya sendiri, bukan hanya sekedar ‘alat’ untuk menyenangkan laki-laki. Sebaliknya, perempuan merupakan agen rasional yang memiliki martabat dan mampu untuk menentukan nasibnya sendiri.

Bertahun-tahun setelahnya, John Stuart Mill dan Harriet Taylor sepasang suami istri, juga membahas mengenai bagaimana perempuan dapat mengambil keputusannya masing-masing, namun mereka juga menambahkan dalam mengambil keputusan tersebut diperlukan alasan yang rasional. Mill dan Taylor dalam (Tong 2014) berpendapat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, setiap individu perlu diberikan kebebasan untuk mengejar impiannya masing-masing, asalkan tidak mengganggu atau menghalangi satu sama lain dalam prosesnya. Sejalan dengan pemikiran Wollstonecraft, dalam mencapai kesetaraan gender, Mill dan Taylor berpendapat bahwa masyarakat harus memberikan perempuan hak politik, kesempatan ekonomi, dan juga pendidikan yang sama dengan laki-laki (ibid). Mill dan Taylor memiliki pandangan yang berbeda terkait peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Mill berpendapat bahwa bahkan setelah perempuan mendapatkan pendidikan dan diberikan hak sepenuhnya, kebanyakan dari mereka tetap akan memilih untuk berada di rumah dibandingkan mendukung

perekonomian keluarga (ibid). Sedangkan Taylor memiliki pendapat yang berbeda, ia menentang asumsi tradisional mengenai perempuan lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga daripada memiliki pekerjaan (ibid). Meskipun diantara Mill dan Taylor memiliki pandangan yang berbeda terkait peran perempuan, penulis melihat berdasarkan pendapat mereka, perempuan berhak untuk memilih apakah akan menjadi ibu rumah tangga ataupun memiliki pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan membantu perekonomian keluarganya.

Lalu adapun seorang aktivis perempuan sekaligus pemikir feminisme liberal, Betty Friedan, yang juga mengutarakan pendapatnya melalui tulisan-tulisan seperti *'The Feminine Mystique'* dan juga *'The Second Stage'* mengenai kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Friedan dikenal sebagai salah satu aktivis perempuan yang ikut serta dalam pergerakan perempuan yang menuntut untuk menegakkan *'sex amandement'* pada tahun 1966 di Amerika Serikat. Friedan juga menjadi pemimpin sebuah organisasi perempuan yaitu *National Organization for Women (NOW)*, NOW merupakan organisasi feminis pertama di Amerika Serikat pada abad ke 20 yang menentang diskriminasi gender dalam semua bidang kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi dan kehidupan personal (ibid). Tidak hanya sebagai aktivis, Friedan juga dikenal sebagai pemikir feminisme liberal yang menuangkan pemikirannya ke dalam buku seperti *'The Feminine Mystique'* dan juga *'The Second Stage'*. Dalam buku pertamanya, yaitu *'The Feminine Mystique'*, Friedan menganggap bahwa peran tradisional perempuan sebagai istri atau ibu rumah tangga tidak memuaskan, sehingga ia menyatakan bahwa perempuan perlu mencari pekerjaan atau menjadi angkatan kerja (Friedan 1977). Buku pertama Friedan tak lepas dari kritik, *The Feminine Mystique* tidak melihat bagaimana

sulitnya bagi perempuan untuk menggabungkan antara urusan karier dan urusan istri atau ibu rumah tangga (Tong 2014). Dalam buku kedua, *The Second Stage*, terdapat perbedaan pada pemikiran Friedan dalam melihat perempuan dengan laki-laki dibandingkan dengan buku pertamanya. Perbedaan ini dapat terlihat pada pendapat Friedan dalam buku pertamanya yang percaya bahwa perempuan harus sama dengan laki-laki, sedangkan dalam buku keduanya ia berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi seperti laki-laki atau setara, asalkan masyarakat bisa menghargai sifat feminim sama seperti sifat maskulin. Kemudian, daripada memberikan saran kepada perempuan untuk meningkatkan maskulinitas agar bisa sama dengan laki-laki pada buku pertamanya, dalam buku kedua, Friedan percaya bahwa perempuan perlu menerima sifat feminimnya dan tidak perlu mengelak akan perbedaan mereka dengan laki-laki (ibid).

Berangkat dari banyaknya pemikiran-pemikiran para tokoh feminisme liberal, teori ini memiliki beberapa komitmen politik yang disampaikan oleh Wendell (1987) yaitu:

- ***Women and Individualism:*** Mempromosikan pengakuan yang lebih besar terhadap nilai perempuan secara individu,
- ***Equality of Opportunity:*** Mendapatkan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam ekonomi dan pendidikan
- ***Equality of Legal Rights:*** Mendapatkan keadilan hukum atau kebijakan bagi perempuan
- ***Education and Reform:*** Menggunakan pendidikan sebagai alat utama dalam reformasi sosial.

Tidak seperti aliran lain pada feminisme, Wendell (1987) juga menambahkan bahwa feminisme liberal mengupayakan kesetaraan gender melalui reformasi hukum atau kebijakan. Feminis liberal ingin mengakhiri diskriminasi gender dengan melibatkan negara untuk mencapai tujuan tersebut melalui hukum atau kebijakan (ibid). Oleh karena itu, komitmen politik feminisme liberal dapat digunakan untuk melihat kebijakan suatu negara dalam mempromosikan kesetaraan gender di dalam politik luar negerinya, yang tentunya berfokus pada pemberdayaan perempuan secara individu hingga kesetaraan bagi perempuan (ibid).

Lalu, selain melihat penerapan nilai-nilai feminisme liberal secara individu (ditujukan untuk perempuan) dalam politik luar negeri Australia saat kepemimpinan Gillard menggunakan komitmen-komitmen politik feminisme liberal yang disampaikan oleh Wendell (1987), penulis juga menambahkan variabel *nationalism and masculinity* (Enloe 2014) guna membantu melihat penerapan nilai-nilai feminisme liberal dalam konteks yang lebih luas yaitu 'negara' secara internasional. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Enloe (2014) bahwa pada abad ke-21, semangat nasionalis yang maskulin dapat dirasakan melalui politik luar negeri sebuah pemerintahan. Sedangkan, pandangan feminisme liberal hanya berfokus untuk menghilangkan supremasi laki-laki yang membentuk keinginan dan kebutuhan perempuan secara individu, serta menginginkan negara sebagai sekutu untuk mencapai hal tersebut melalui hukum atau kebijakan (Wendell 1987)

- ***Nationalism and Masculinity*** (Enloe 2014)

Enloe (2014) menjabarkan banyaknya contoh mengenai penindasan, diskriminasi, hingga konflik yang terjadi di berbagai negara yang terlihat sangat mencerminkan nilai maskulinitas. Tidak hanya di dalam

negeri, nilai maskulinitas juga terlihat pada politik luar negeri suatu pemerintahan (Enloe 2014).

Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai feminisme, yang di mana menginginkan kesetaraan, keadilan, dan kebebasan dapat berkembang di tengah masyarakat (Wendell 1987). Gagasan-gagasan feminisme dan penataan feminis telah tumbuh menjadi lebih berpengaruh secara internasional pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Oleh karena itu, banyak perempuan yang menentang untuk menjadi simbol bangsa belaka, mereka juga menuntut pendekatan feminis yang setara dengan pendekatan maskulin dalam melihat konteks negara (Enloe 2014).

### **1.7 Argumen Sementara**

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, penulis berpendapat bahwa politik luar negeri Australia selama masa kepemimpinan Julia Gillard merupakan politik luar negeri yang memiliki komitmen-komitmen feminisme liberal seperti yang dijelaskan oleh Wendell (1987) yaitu *Women and Individualism, Equality of Opportunity, Equality of Legal Rights, serta Education and Reforms*. Salah satu contohnya dapat terlihat pada strategi bantuan AusAID pada tahun 2011, yang berfokus pada kesetaraan pendidikan bagi perempuan, mempromosikan nilai perempuan secara individu, memberdayakan perempuan dalam ekonomi, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan melalui hukum dan kebijakan (AusAID 2011).

Lalu, dengan menggunakan variabel *Nationalism and Masculinity* oleh Enloe (2014), penulis melihat politik luar negeri Australia selama kepemimpinan Gillard juga menerapkan nilai-nilai feminisme liberal ke dalamnya. Salah satu contohnya terlihat pada dokumen '*Australia in The Asian Century White Paper*'. Penulis berpendapat bahwa dalam Buku Putih tersebut, Gillard menerapkan nilai-nilai feminisme liberal di dalamnya, yang di mana terlihat di dalam Buku Putih tersebut bahwa Australia merupakan negara yang terbuka untuk bekerja sama dan berhubungan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia (Australian Government 2012). Australia lebih memilih untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain, dibandingkan menjadi negara yang menindas dan suka menyebabkan konflik, yang di mana hal tersebut sangat mencerminkan maskulinitas.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis dapat mendeskripsikan pembahasan dan hasil analisa penulis terkait feminisme liberal pada politik luar negeri Australia selama masa kepemimpinan Julia Gillard. Untuk mendukung data dan analisa dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian.



### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah Julia Gillard, yang di mana posisinya sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan luar negeri Australia pada masa kepemimpinannya menjadi objek dalam penelitian ini.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur-literatur dan bahan bacaan yang resmi dan terpercaya, seperti buku-buku, artikel-artikel dan jurnal ilmiah. Lalu penulis melihat keterkaitan subjek dengan objek penelitian.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Melakukan studi literatur yang terkait tentang topik yang akan dibahas.
2. Mengumpulkan data-data yang ditemukan saat studi literatur.
3. Menerapkan dan menganalisis hasil-hasil temuan dalam menjawab rumusan masalah, pembahasan dan membuat kesimpulan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini dapat diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Dinamika Politik Faksional Partai Buruh Australia Tahun 2010-2013**

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana proses terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri hingga masa pemerintahannya.

**BAB III : Analisis Feminisme Liberal pada Kebijakan Luar Negeri Australia Selama Kepemimpinan Julia Gillard**

Bab ini berfokus pada bagaimana politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Julia Gillard dilihat dari sudut pandang feminisme liberal.

**BAB IV : Penutup**

Pada bab ini penulis akan memberikan saran dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

## **BAB II**

### **Dinamika Politik Faksional Partai Buruh Australia Tahun 2010-2013**

Lumsdaine (1996) menyatakan bahwa ada beberapa macam cara politik domestik yang dapat mempengaruhi politik luar negeri, diantaranya adalah meyakini bahwa politik domestik terus menerus memiliki kendala atau hal yang bias dengan politik luar negeri. Lalu, negara yang memiliki program kesejahteraan yang kuat di dalam negerinya, akan cenderung memiliki program bantuan yang kuat pada politik luar negerinya (Lumsdaine 1993, Lumsdaine 1996), seperti yang dilakukan oleh Australia pada AusAID tahun 2011. Crawford dan Pini (2010) menyatakan bahwa parlemen merupakan institusi yang mencerminkan maskulinitas, terbukti pada masa kepemimpinan Gillard, ia mendapatkan serangan yang berbasis gender. Hal tersebut memuncak dengan terjadinya pidato Gillard yang ditujukan kepada pimpinan oposisi yaitu Tony Abbott (lihat sub-bab 2.2), yang dimana hal ini mendapatkan perhatian dunia internasional karena telah memperlihatkan sisi patriarki pada politik domestik Australia (Holland and Wright 2017).

Berdasarkan argumen Lumsdaine (1996) mengenai pengaruh politik domestik memiliki hal yang bias dengan politik luar negeri, dalam kasus pemerintahan Gillard, karena pidato Gillard menjadi viral dan sisi patriarki politik Australia telah dilihat oleh mata internasional, Australia memiliki beberapa politik luar negeri yang mempromosikan kesetaraan gender di dalamnya untuk memperbaiki citranya di panggung internasional. Sebelumnya, pada September 2012, saat Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-67, Gillard

menyatakan bahwa Australia akan membantu untuk meningkatkan kesetaraan gender (ABC News 2012).

Lalu, Skidmore dan Hudson (1993) dalam (Saroha 2019), menekankan bahwa politik domestik dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Mereka mengidentifikasi 3 model pendekatan yang dapat menjelaskan pengaruh politik domestik dalam pembuatan politik luar negeri. Pendekatan pertama adalah model statis, yang mengasumsikan dalam merumuskan politik luar negeri, para pembuat kebijakan bertindak secara otonom dan menganggap pemerintah lebih besar daripada masyarakat, sehingga mengabaikan peran masyarakat dalam politik luar negeri. Model kedua adalah pendekatan pada masyarakat, model ini melihat bahwa masyarakat negaranya memiliki peran penting dan berkelanjutan dalam politik luar negeri. Model ketiga adalah pendekatan trans-nasional, yang dimana mengasumsikan bahwa kesamaan kepentingan dalam kelompok masyarakat dapat membentuk kerja sama politik yang melebihi batas-batas negara (Skidmore and Hudson 1993). Berangkat dari ketiga model pendekatan tersebut, sebelum melihat politik luar negeri Australia yang menerapkan nilai-nilai feminisme liberal, penting untuk melihat situasi dalam negeri Australia selama masa kepemimpinan Julia Gillard.

## **2.1 Politik Faksional Partai Buruh: Julia Gillard dan Suksesi Perdana Menteri Australia Tahun 2010**

Faksi politik atau kelompok-kelompok kekuasaan merupakan sebuah hal yang dimiliki oleh setiap organisasi dan juga partai politik. Dalam kasus Partai Buruh Australia, mereka memiliki faksi yang jauh lebih terstruktur daripada partai

politik lainnya di Australia (Leigh 2000). Leigh (2000) menyatakan bahwa peran dari faksi itu sendiri adalah untuk mengalokasikan posisi partai. Sejak lama, faksi di dalam Partai Buruh seperti sayap kanan, kiri, dan kiri-tengah telah terbentuk. Karena adanya faksi-faksi atau kelompok-kelompok kecil yang terbentuk di dalam partai, kekuatan Partai Buruh Australia hanya dipengaruhi oleh salah satu faksi saja dan bukan oleh Partai secara keseluruhan. Hal ini juga mengakibatkan adanya ketegangan antar faksi atau kelompok dalam Partai Buruh Australia (ibid). Namun perlu diketahui bahwa pemimpin partai akan selalu mempertimbangkan kepentingan negara dan juga kepentingan dari faksi (Kefford 2013). Dalam kasus Partai Buruh Australia pada tahun 2010, kita dapat melihat adanya kelompok-kelompok pendukung dari kedua pihak antara Julia Gillard dengan Kevin Rudd yang seiring waktu mengganti posisi dukungannya.

Pada tahun 2007, Partai Buruh Australia (ALP) memenangkan pemilihan umum dengan Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri dan Julia Gillard sebagai wakil Perdana Menteri. Setelah terpilih, pemerintahan Rudd dinilai kurang memuaskan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dijanjikannya tidak terpenuhi secara maksimal. Hal ini mengakibatkan berkurangnya keyakinan masyarakat Australia terhadap pemerintahan Rudd, terbukti dengan menurunnya suara untuk Partai Buruh dalam survei publik menjadi 40 persen dari negara-negara bagian utama (Simms and Wanna 2012). Dengan dukungan dari para pemimpin faksi dan sebagian besar partai dalam parlemen, Gillard menantang Rudd untuk pemilihan pemimpin Partai Buruh, yang di mana pada akhirnya Rudd mengundurkan diri sebelum waktu pemilihan dan kepemimpinan Partai Buruh diserahkan kepada Gillard pada 24 Juni 2010 (Curtin 2015). Gillard yang pada saat itu diberikan

mandat untuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Rudd, menginisiasi pemilihan umum lebih awal yaitu tanggal 21 Agustus 2010, karena ia ingin menjadi Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh masyarakat (Simms and Wanna 2012). Pemilihan tahun tersebut menjadi pemilihan yang terkesan terburu-buru, dan bukanlah hal yang diprediksi oleh ahli strategi dari Partai Buruh itu sendiri (ibid). Gillard sendiri dalam bukunya yang berjudul *My Story* berpendapat bahwa keputusan untuk menantang Rudd untuk kepemimpinan adalah keputusan kolektif yang tidak direncanakan, diputuskan oleh sejumlah anggota kaukus, anggota partai, dan juga termasuk para pemimpin faksi (Gillard 2014).

Hal-hal seperti pergantian Perdana Menteri pada tahun pemilihan umum, inisiasi pemungutan suara yang terjadi 22 hari setelah pergantian Perdana Menteri, perubahan strategi pemerintah, dan hal lainnya menggambarkan bagaimana pemilihan umum Australia 2010 berbeda dengan pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya (Simms 2012). Setelah pergantian kepemimpinan Partai Buruh dari Rudd menjadi Gillard, suara dalam survei publik untuk Partai Buruh kembali menurun menjadi 37,99 persen, yang di mana sebelumnya telah menurun pada angka 40 persen pada saat kepemimpinan Rudd (Simms and Wanna 2012). Penulis berpendapat, penurunan suara dari Partai Buruh ini diakibatkan oleh permasalahan gender yang di mana Gillard adalah seorang perempuan, bagi perempuan yang melanggar ciri-ciri perempuan secara tradisional atau bersikap maskulin akan dinilai tidak feminim, sementara mereka yang tetap pada pendiriannya sebagai perempuan (yang menekankan pada kehangatan, kejujuran, dan kasih sayang), akan kehilangan dukungan elektoral yang penting (Denemark, Ward and Bean 2012). Dilema tersebut dapat mengakibatkan adanya pandangan skeptis dari para pemilih

tentang perempuan yang memimpin. Para pemilih terkejut ketika Gillard mengambil alih kepemimpinan dari Rudd. Meskipun ia memberikan sedikit penjelasan kepada masyarakat atas keputusannya, minimnya komunikasi dengan pemilih ini menjadi salah satu kritik pada masa pemerintahannya (Curtin 2015).

Setelah menginisiasi pemilihan umum pada tahun 2010, yang mana lebih cepat dan terkesan terburu-buru, Australia menghadapi situasi yang dapat dikatakan sebagai '*interregnum*'. Simms (2012) menyatakan bahwa masa peralihan pemerintahan ini dapat dikatakan sebagai istilah '*interregnum*', yang di mana mengacu pada waktu menjelang pemilihan, masa kampanye, pengumuman hasil, dan pengambilan sumpah dari pemimpin yang terpilih. Hal ini juga mencakup periode sementara dan mengasumsikan adanya penundaan dalam pembentukan pemerintahan (ibid). Pada saat itu, Gillard yang mengambil alih kepemimpinan dari Rudd menginisiasikan pemilihan, yang di mana menjadikannya sebagai '*caretaker*' pada pemilihan tahun itu. Dalam politik Australia, istilah mengenai '*caretaker*' biasanya mengacu pada periode kampanye itu sendiri, periode singkat antara pengumuman hasil pemilihan dan pembubaran parlemen (ibid). Pada masa ini Gillard memosisikan dirinya sebagai '*caretaker*' seperti dengan menolak untuk pindah ke rumah dinas Perdana Menteri, menunjukkan bahwa pemilihan perlu dilakukan untuk memperjelas posisinya sebagai Perdana Menteri yang terpilih, dan juga tetap memberikan mandat sebagai pemimpin (ibid).

Partai Buruh yang pada saat itu menjadi partai minoritas di bawah kepemimpinan Gillard, tetap melakukan kampanye-kampanye untuk memperoleh kembali suara yang berkurang selama masa kepemimpinan Rudd dan juga masa peralihan ke kepemimpinan Gillard. Pada tanggal 17 Juli 2010, Gillard melakukan

konferensi pers setelah pembubaran parlemen, yang di mana dalam konferensi pers tersebut ia mengumumkan tanggal pemilihan umum jatuh pada tanggal 21 Agustus dan juga memberi alasan bagi masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan umum. Mengutip dari kanal Youtube Partai Buruh Australia, dalam pidatonya Gillard menyampaikan bahwa Australia harus 'bergerak maju', ia menyatakan bahwa masyarakat Australia harus bergerak maju dalam beberapa bidang seperti; perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk melawan perubahan iklim, membangun perekonomian yang kuat, memperkuat perbatasan untuk melindungi Australia dari penyelundupan manusia, meningkatkan layanan kesehatan untuk masyarakat Australia, dan juga untuk memastikan anak-anak di Australia mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Australian Labor Party 2010). Di sisi lain, Tony Abbott yang merupakan pimpinan Partai Liberal saat itu menanggapi dengan cepat, yang di mana Abbott menyatakan bahwa jika ia terpilih, ia akan membela Australia, menghentikan pajak-pajak baru, menghentikan perahu pencari suaka, dan juga menghentikan pemborosan (Simms 2012).

Selama masa kampanye, kedua kandidat yaitu Gillard dan Abbott terus menyampaikan visi dan misi mereka jika mereka terpilih pada pemilihan tahun tersebut. Mereka hadir dalam beberapa acara seperti di stasiun radio, televisi, dan lainnya, untuk menyampaikan kampanye mereka agar sampai kepada seluruh warga Australia. Hingga tanggal 20 Agustus 2010, sehari sebelum hari pemilihan umum, selama 35 hari kedua kandidat berkampanye secara non-stop (ibid). Dalam beberapa wawancara terakhir di saluran ABC dan stasiun komersial lainnya, ABC melihat tema besar yang dibawa oleh kedua kandidat pada pemilihan umum tahun tersebut yaitu Gillard melihat pilihan yang nyata, kontes yang sulit, dan ia memiliki



rencana yang positif untuk pekerjaan, kesehatan, rumah sakit, dan jalur yang luas (ibid). Sedangkan Abbott berpendapat bahwa Australia akan bisa memperbaiki masalah dengan cara mengubah pemerintahan, ia juga melihat betapa kerasnya dia melakukan kampanye dalam upayanya untuk menyediakan ‘alternatif yang jelas’ untuk pemerintahan (ibid).

Pada tanggal 21 Agustus 2010, pemilihan umum dilakukan seperti yang telah ditentukan. Namun, hal menarik lainnya terjadi pada saat penghitungan hasil suara yang telah diambil. Kedua partai besar, yaitu Partai Buruh dan koalisi Partai Liberal-Nasional memiliki hasil yang sengit. Setelah penghitungan suara, menjadi jelas bahwa Partai Buruh Australia maupun koalisi Partai Liberal-Nasional kemungkinan tidak akan memperoleh suara mayoritas yang jelas, yang di mana kedua partai mendapatkan 72 dari 150 kursi di *House of Representative* (Costar 2012). Karena hal tersebut, anggota parlemen independen memiliki peran penting dalam pembentukan pemerintahan pada tahun 2010, negosiasi-negosiasi dilakukan oleh kedua pemimpin partai untuk meyakinkan independen agar mendukung pemerintahannya. Sampai pada akhirnya tersisa 3 independen yang menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri Australia pada saat itu, ketiga independen ini diantaranya adalah Bob Katter, Tony Windsor, dan Rob Oakeshott, yang di mana Abbott membutuhkan suara dari ketiganya, sedangkan Gillard hanya membutuhkan dua (ibid). Katter mengumumkan 20 poin negosiasi untuk kedua kandidat, dan ditolak oleh Partai Buruh, yang di mana mengindikasikan Katter akan mendukung pemerintahan koalisi Partai Liberal-Nasional. Lalu dalam konferensi pers pada tanggal 7 September 2010, Windsor dan Oakeshott menyatakan bahwa mereka akan mendukung administrasi minoritas Partai Buruh dalam hal penawaran,

suara kepercayaan dan dalam memberlakukan peraturan (ibid), sehingga memastikan bahwa Gillard akan melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Australia.

## **2.2 Serangan Terhadap Pemerintahan Gillard**

Mulai dari menggantikan Kevin Rudd sebagai pemimpin Partai Buruh yang menjadi hal yang kontroversial, hingga melewati masa pemilihan umum yang sengit dengan pimpinan koalisi Partai Liberal-Nasionalis, Julia Gillard akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri Australia pada tahun 2010. Terpilihnya perempuan pertama sebagai Perdana Menteri Australia, menambahkan warna dalam kejadian demi kejadian pada politik Australia pada tahun tersebut. Pada masa awal pemerintahannya, Gillard memiliki popularitas yang tinggi, banyak perempuan dan anak-anak perempuan yang sangat senang dengan pencapaian ini (Summers 2012). Disamping keberhasilannya untuk terpilih sebagai Perdana Menteri, tentunya Gillard juga mendapatkan kritik dan komentar dari banyak pihak, seperti media. Media menggambarkan Gillard sebagai ‘pembunuh yang menusuk dari belakang’ (Williams 2017), hal ini mengacu kepada prosesnya menjadi pemimpin Partai Buruh, sekaligus Perdana Menteri Australia pada tahun 2010 menggantikan Rudd. Sedangkan jika dibandingkan dengan Malcolm Turnbull pada tahun 2015 yang menantang Abbott dalam pemilihan pemimpin Partai Liberal, Williams (2017) melihat bahwa Turnbull tidak mendapatkan gambaran yang negatif seperti yang didapatkan oleh Gillard pada tahun 2010. Turnbull terkesan mendapatkan gambaran seperti seseorang yang mendapatkan takhtanya kembali (ibid). Kritik dan komentar juga datang dari pihak lain, tidak terkecuali dari

pimpinan oposisi. Kritik yang berbasis gender terhadap Gillard selama masa pemerintahannya mulai memanas pada tahun 2011 dan 2012 lalu memuncak dalam pidato yang terkenal sebagai '*misogyny speech*' (Varney 2017).

Selama masa kampanye, Gillard pernah menyampaikan bahwa tidak ada pajak karbon selama masa pemerintahan yang ia pimpin. Namun, untuk mengamankan dukungan dari Partai Hijau, Gillard mengeluarkan kebijakan '*carbon price*', yang di mana mengundang protes dari masyarakat karena Gillard dianggap mengingkari janjinya selama masa kampanye mengenai pajak karbon (Summers 2012). Masalah personal Gillard menjadi sasaran empuk bagi para pemrotes kebijakan *carbon price*. Varney (2017) menyatakan bahwa Gillard bukan hanya Perdana Menteri perempuan pertama di Australia, tetapi ia juga seorang kepala negara yang tidak menikah dan tidak memiliki anak. Hal tersebut membuat para penentang kebijakan ini melihat Gillard sebagai sosok yang tidak memenuhi syarat lengkap sebagai perempuan dan tidak layak untuk memimpin sebuah negara (Varney 2017). Amarah masyarakat terlihat pada saat adanya aksi protes terkait pajak karbon yang dikeluarkan Gillard, aksi ini terjadi di Canberra pada bulan Maret 2011. Dalam aksi protes tersebut terlihat beberapa spanduk bertuliskan kalimat '*Juliar*' yang merupakan gabungan antara Julia dan juga *liar* (pembohong). Summers (2012) berpendapat bahwa istilah tersebut diciptakan oleh seorang penyiar radio yaitu Alan Jones, dan seketika dipakai oleh para penentang Gillard dalam aksi protes tersebut. Dalam serial dokumenter ABC News yang berjudul *The Killing Season*, tak hanya sebutan '*juliar*', pada aksi protes tersebut kita juga dapat melihat adanya kalimat-kalimat lain untuk menyerang Gillard seperti '*Bob Brown's bitch*' yang di mana Bob Brown adalah pemimpin Partai Hijau saat itu, dan juga

ada kalimat *'Ditch the Witch'* (ABC News 2015). Pemimpin oposisi, Abbott juga ikut menghadiri aksi protes tersebut dan memperkeruh ketegangan antara dirinya dengan Gillard.

Celah dalam pemerintahan Gillard ini dimanfaatkan oleh Abbott. Selama berjalannya pemerintahan Gillard, pemimpin oposisi tanpa henti memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang Gillard karena kebijakan pajak karbonnya. Abbott menggambarkan bahwa Gillard adalah orang yang tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya, dan juga pembohong (Summers 2012). Dalam sidang parlemen, Abbott beberapa kali mencela Gillard selama berbicara, dan ia melakukannya dengan suara pelan agar hanya terdengar oleh Gillard. Pada tanggal 20 Agustus 2012, *Speaker* parlemen mendengar Abbott menyebutkan bahwa Gillard adalah seorang pembohong dan Abbott diperintahkan untuk keluar. Abbott ditangguhkan dari parlemen selama 1 jam, sekaligus menjadi pemimpin oposisi pertama yang dikeluarkan dari HoR sejak tahun 1980-an. Summers (2012) berpendapat bahwa mengatakan seseorang pembohong merupakan hal yang tidak etis dalam parlemen. Tekanan yang diterima oleh Gillard selama kepemimpinannya semakin meningkat dengan adanya pendapat dari penyiar radio Alan Jones yang menyerang masalah personal Gillard. Beberapa waktu setelah ayah dari Julia Gillard meninggal, Jones menyampaikan pendapatnya kepada para anggota pemuda pendukung Partai Liberal (*Young Liberals*) bahwa ayah dari Julia Gillard 'meninggal dengan rasa malu' karena anaknya selalu menyampaikan kebohongan di parlemen (The Australian 2012). Ketegangan antara Abbott dan Gillard memuncak pada saat Gillard menyampaikan pidatonya di parlemen yang di mana terkenal dengan sebutan *'misogyny speech'*.

Pada tanggal 9 Oktober 2012, pemimpin oposisi menyampaikan mosi kecaman kepada pemerintahan Gillard karena diduga memaafkan pesan teks seksis yang dikirim oleh *speaker* Peter Slipper (Slipper sebelumnya dituduh mengirim pesan yang berbau seksis kepada staffnya), perdebatan mengenai seksisme menjadi topik utama pada pagi itu (Varney 2017). Dalam menanggapi pernyataan dari pimpinan oposisi, Gillard membalasnya dengan menyampaikan pidato yang menyerang Abbott. Gillard menyatakan:

*“I rise to oppose the motion moved by the Leader of the Opposition, and in so doing I say to the Leader of the Opposition: I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. The government will not be lectured about sexism and misogyny by this man—not now, not ever.”*  
(Commonwealth of Australia 2012)

Dalam pidato tersebut, Gillard menyebutkan bahwa pemimpin oposisi adalah seorang yang seksis dan *misogyny*. Gillard juga memberikan beberapa contoh untuk memperkuat argumennya terhadap Abbott. Contoh yang pertama, saat menjadi Menteri pada pemerintahan John Howard, Abbott menyatakan bahwa perempuan secara biologis kurang cocok untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan dibandingkan laki-laki. Kedua, saat menjadi Menteri Kesehatan ia menyatakan bahwa ‘aborsi merupakan jalan keluar’ untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Ketiga, Gillard mengatakan bahwa Abbott menggambarkan peran perempuan Australia hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja. Lalu, Gillard merasa tersinggung karena pemimpin oposisi berdiri di tengah spanduk-spanduk yang menyerang Gillard (seperti yang telah disebutkan di atas) dalam aksi protes anti pajak karbon. Gillard menyampaikan contoh-contoh tersebut karena merasa tersinggung atas tindakan-tindakan Abbott (Donaghue 2015).

Peristiwa *misogyny speech* ini menuai perhatian dari banyak pihak, baik itu dari masyarakat Australia sendiri, hingga dunia internasional. Crawford dan Pini (2010) berpendapat bahwa parlemen merupakan institusi yang maskulin dan dibuat untuk didominasi oleh laki-laki. Pidato Gillard menjadi salah satu contoh peristiwa yang menjadi viral dan diakui oleh dunia internasional, karena telah memperlihatkan sisi patriarki yang melekat dalam politik Australia (Holland and Wright 2017). Tidak berhenti disitu, Gillard tidak hanya menghadapi rintangan dari pihak oposisi saja. Permasalahan internal yang terjadi di dalam Partai Buruh karena adanya penurunan kepercayaan terhadap Gillard juga menjadi rintangan yang harus dihadapi selama kepemimpinannya.

### **2.3 Konflik Internal Partai Buruh**

Setelah menggantikan Rudd pada tahun 2010 dan menjadi Perdana Menteri yang terpilih di tahun yang sama, selama masa pemerintahannya, Gillard tidak hanya menghadapi masalah yang berasal dari pihak luar, namun juga dari dalam Partai Buruh itu sendiri. Setelah terpilih dalam pemilu pada tahun 2010, Gillard juga menunjuk Rudd sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinetnya. Ketegangan antara Gillard dengan Rudd bisa dilihat dengan berkurangnya kedekatan mereka berdua dibandingkan pada saat sebelum kejadian tahun 2010. Beberapa bulan selama kepemimpinannya, Gillard mendapatkan banyak kritik dan juga komentar dari beberapa pihak atas kebijakannya, seperti kebijakan '*carbon price*' yang menjadi serangan bagi pemerintahannya. Setelah adanya peristiwa protes 'anti pajak karbon', suara untuk partai buruh dalam survei publik *newspoll* turun ke

angka 30 persen (ABC News 2015), hal ini juga membuat kepercayaan terhadap Gillard dari dalam Partai Buruh mulai menurun.

Dalam wawancara di serial dokumenter *The Killing Season* ABC News, salah satu pendukung Gillard pada tahun 2010 untuk menggantikan kepemimpinan Rudd di Partai buruh, yaitu Mark Bishop (saat itu senator Partai Buruh untuk negara bagian Australia Barat), menyatakan bahwa “kita melakukan kesalahan”. Bishop juga menambahkan bahwa hal-hal yang ingin dicapai saat mengganti pemimpin Partai Buruh, tidak tercapai dengan Gillard. Ia berpendapat bahwa Gillard tidak memiliki kepribadian atau otoritas yang besar dalam melakukan tugasnya (ibid). Suasana dalam Partai Buruh semakin diperkeruh karena Rudd mengundurkan dirinya sebagai Menteri Luar Negeri pada 22 Februari 2012. Pengunduran diri Rudd sebagai Menteri Luar Negeri ini, memicu ketegangan antara dirinya dengan Gillard semakin memanas setelah sebelumnya Rudd diperkirakan telah mencari bantuan atau dukungan dari banyak pihak untuk menantang Gillard dalam pemilihan pemimpin Partai Buruh (Curran 2012). Gillard merespon hal ini dengan mengadakan pemilihan pemimpin Partai Buruh pada tanggal 27 Februari 2012. Rudd sendiri memastikan bahwa ia akan ikut serta mencalonkan diri pada pemilihan tersebut, Rudd menyatakan bahwa Gillard telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat Australia dan ia akan mengembalikan kepercayaan tersebut jika ia terpilih kembali menjadi pemimpin Partai Buruh (Griffiths 2012). Untuk mendapatkan dukungan dari para anggota partai, baik Rudd maupun Gillard percaya bahwa di bawah kepemimpinan mereka masing-masing, mereka bisa memenangkan pemilihan umum selanjutnya melawan Abbott yang merupakan pemimpin oposisi, meskipun pihak oposisi memimpin suara dalam survei publik



untuk pemilihan umum selanjutnya (ibid). Rudd juga berjanji bahwa ia akan menjadi *backbenchers* jika ia tidak terpilih pada hari pemilihan saat itu (Ireland 2012). Pada hari pemilihan, Gillard memenangkan pemungutan suara sebesar 71 suara, mengalahkan Rudd yang mendapatkan 31 suara (Griffiths 2012). Rudd menerima kekalahannya dalam pemungutan suara tersebut, ia memenuhi janjinya untuk menjadi *backbenchers* dan tidak keluar dari Partai Buruh (ibid).

Setahun setelah adanya *leadership spill* pada Februari 2012, masalah ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Gillard kembali menjadi pembahasan. Pada tahun 2013, Gillard mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk Perdana Menteri Australia jatuh pada tanggal 14 September 2013. Namun, karena selama lebih dari 2 tahun selalu menempati posisi yang kurang menguntungkan dalam survei publik, banyak anggota parlemen Partai Buruh yang tidak percaya bahwa Partai Buruh akan memenangkan pemilihan umum tahun tersebut (Hartcher 2013). Permasalahan semakin diperkeruh dengan adanya salah satu pendukung Gillard yaitu Simon Crean yang berbicara kepada pers bahwa ia tidak lagi mendukung Gillard dan meminta Gillard untuk mengadakan pemilihan pemimpin Partai Buruh sekaligus mencalonkan diri sebagai Wakil pemimpin Partai (ABC News 2015). Gillard merespon dengan mengadakan pemilihan pemimpin Partai Buruh pada tanggal 21 Maret 2013. Namun, Rudd tidak mencalonkan diri pada saat itu, ia berkata pada pers bahwa ia memegang teguh janjinya mengenai tidak akan menantang posisi Gillard sebagai pemimpin Partai Buruh (ibid). Sebagai hasil akhir, Gillard memenangkan pemungutan suara tersebut tanpa lawan. Setelah pemilihan tersebut, Gillard mengeluarkan Crean dari kementerian, dan 7 pendukung Rudd mengundurkan diri (ibid).



Tidak sampai disitu, dukungan dari kaukus terhadap Gillard terus menurun mengikuti turunnya suara untuk Partai Buruh dalam survei publik, banyak yang percaya bahwa Gillard tidak dapat memenangkan pemilihan umum pada tahun tersebut (Cassidy 2013). Pada bulan Juni 2013, para pendukung Rudd mulai mengajukan petisi kepada kaukus untuk menantang kursi kepemimpinan Gillard. Pendukung Rudd mulai bergerak karena memiliki keyakinan bahwa Rudd siap untuk memimpin dan memiliki pendukung mayoritas (Hartcher 2013). Gillard merespon dengan mengadakan pemilihan pemimpin (sekaligus wakil pemimpin) Partai Buruh untuk yang kedua kalinya di tahun yang sama pada tanggal 26 Juni 2013, Gillard juga menyampaikan bahwa ia akan meninggalkan parlemen jika kalah dalam pemilihan ini, dan begitu juga dengan lawannya (Ireland 2013). Rudd mengkonfirmasi bahwa ia akan mengikuti pemilihan ini sebagai calon pemimpin Partai Buruh sekaligus Perdana Menteri Australia.

Kesempatan kemenangan Rudd semakin tinggi karena salah satu pendukung Gillard dalam *leadership spill* pada tahun 2010 yaitu Bill Shorten, mengumumkan bahwa ia mendukung Rudd dalam pemilihan ini (ibid). Hasil dari pemilihan tersebut adalah kemenangan untuk Rudd dengan 57 suara mengalahkan Gillard dengan 45 suara (Griffiths 2013), hasil ini menjadikan dirinya sebagai pemimpin Partai Buruh sekaligus Perdana Menteri Australia pada tahun 2013. Dengan hasil tersebut, Gillard menepati janjinya dengan berhenti dari dunia politik saat pemilihan umum selanjutnya yang telah diubah oleh Rudd menjadi tanggal 7 September 2013 (ibid).

## **BAB III**

### **Analisis Feminisme Liberal pada Kebijakan Luar Negeri Australia Selama Kepemimpinan Julia Gillard**

#### **3.1 Analisis Politik Luar Negeri Australia pada Masa Kepemimpinan Julia Gillard dari Sudut Pandang Feminisme Liberal**

Australia mencatatkan sejarah dengan terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia pada tahun 2010. Lumsdaine (1996) menyatakan bahwa politik domestik dapat mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Memiliki perempuan pertama di negaranya sebagai Perdana Menteri, penulis melihat adanya kemungkinan bagi politik luar negeri Australia akan tertuju kepada hal-hal seperti pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender. Politik luar negeri yang dimaksudkan adalah politik luar negeri yang mendukung pemberdayaan perempuan, mempromosikan kesetaraan gender, dan menyuarakan hak-hak perempuan dalam skala internasional. Naiknya Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia, merupakan salah satu perwujudan kesetaraan gender itu sendiri, mengingat sebagaimana yang dikatakan Crawford dan Pini (2010) bahwa parlemen merupakan institusi yang maskulin. Berbicara mengenai politik luar negeri, Gillard sendiri dalam wawancaranya dengan *ABC News* pernah menyampaikan pandangannya, ia menyatakan bahwa politik luar negeri bukanlah sesuatu yang dia minati, Gillard lebih senang melihat anak-anak Australia belajar membaca di sekolah (ABC News 2010).

Meski demikian, dalam melihat politik luar negeri Australia selama kepemimpinan Gillard, penulis menggunakan sudut pandang feminisme liberal. Feminisme liberal ingin mencapai kesetaraan gender dengan melibatkan negara melalui reformasi hukum atau kebijakan (Wendell 1987). Pada tahun 2012, saat

sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-67, Gillard menyatakan bahwa Australia akan membantu untuk meningkatkan kesetaraan gender, terutama melalui sektor pendidikan. Pada saat yang sama, Gillard juga menyampaikan bahwa Australia telah menyediakan dana sebesar \$320 juta selama 10 tahun untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, kepemimpinan, dan kesempatan bagi perempuan di kawasan pasifik (ABC News 2012).

Dari sudut pandang feminisme liberal, Australia disini berperan untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui politik luar negerinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wendell (1987), feminisme liberal memiliki beberapa komitmen politik yang digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Komitmen-komitmen inilah yang akan penulis gunakan untuk membantu melihat politik luar negeri Australia. Selain itu, penulis juga menambahkan variabel '*nationalism and masculinity*' (Enloe 2014), untuk membantu melihat penerapan nilai-nilai feminisme liberal dalam konteks negara secara internasional pada politik luar negeri Australia.

### ***3.1.1. Women and Individualism: Mempromosikan Pengakuan yang Lebih Besar terhadap Nilai Perempuan secara Individu***

Pada tanggal 13 September 2011, pemerintahan Gillard menunjuk Penny Williams sebagai duta global untuk perempuan dan anak-anak perempuan, yang di mana hal ini merupakan pertama kalinya bagi Australia (Asian Scientist 2011). Dengan adanya duta global ini mewakili Australia di panggung internasional, Australia berkomitmen akan berada di garis depan dalam upaya untuk mempromosikan peran perempuan dan anak perempuan secara global (Australian Department of Foreign Affairs and Trade 2011). Salah satu prioritas duta global ini

adalah meningkatkan representasi perempuan dalam peran kepemimpinan khususnya pada kawasan Asia Pasifik (ibid).

Pada November 2011, salah satu program bantuan Australia, *Australian AID* (AusAID) mengeluarkan strategi tematik dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan mendasar dari AusAID ini adalah untuk mengatasi kemiskinan (AusAID 2011). Pemerintah Australia telah berkomitmen untuk berada di garis depan dalam mendukung kesetaraan gender secara praktik dan melihat kesetaraan gender sebagai tema lintas sektor yang penting dalam program bantuan (ibid). Program AusAID pada masa kepemimpinan Gillard berbeda dengan masa kepemimpinan Perdana Menteri Australia sebelumnya, seperti John Howard. Australia berfokus untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam program AusAID masa pemerintahan Gillard (ibid). Sedangkan pada tahun 2005, pemerintahan Howard merilis laporan program bantuan Australia dalam merespon tsunami di Samudra Hindia, program AusAID pada masa pemerintahan Howard berfokus untuk membantu negara-negara yang terkena dampak bencana tsunami di Samudra Hindia (AusAID 2005). Meskipun bergerak dalam bidang kemanusiaan, AusAID pada masa pemerintahan Howard tidak mencakup pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan bencana.

Pada masa kepemimpinan Gillard, untuk memberikan hasil nyata dalam strategi AusAID, Australia berfokus pada 4 pilar yang diselaraskan dengan aspek kesetaraan gender, diantaranya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pembangunan perdamaian (pilar ke-2). Salah satu pendekatan strategi AusAID pada pilar ke-2 adalah untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil di negara-negara mitra guna

membangun lingkungan yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan administratif (ibid).

Lalu, bertepatan dengan hari perempuan internasional, 8 Maret 2012, Australia mengeluarkan *Australian National Action Plan on Women, Peace, and Security 2012-2018*. *National Action Plan* (NAP) ini dirilis oleh pemerintahan Australia dengan komitmen untuk mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 (UNSCR 1325 *on Women, Peace, and Security*) (FaHCSIA 2012). Australia dalam NAP ini menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan bukan hanya menjadi korban yang membutuhkan perlindungan di tengah konflik, mereka juga merupakan agen yang dapat melanggengkan konflik maupun mengupayakan perdamaian (ibid). Perempuan juga sering dikecualikan dalam proses pengambilan keputusan seputar pencegahan konflik, pengupayaan perdamaian, dan usaha pemulihan. Pengecualian ini juga berarti bahwa peran perempuan sebagai agen perubahan di tengah konflik seringkali kurang diakui dan kurang dihargai (ibid). Oleh karena itu, salah satu tujuan dari NAP ini adalah untuk mempromosikan representasi perempuan dalam pencegahan konflik, pengupayaan perdamaian, serta resolusi dari konflik (Hawksley and Georgeou 2013).

Pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2012, para pemimpin negara di kawasan Kepulauan Pasifik berkumpul untuk menghadiri Forum Kepulauan Pasifik ke-43 di Rarotonga, Kepulauan Cook. Australia diwakili oleh Gillard dalam pertemuan ini, dan merupakan satu-satunya perempuan pemimpin negara yang hadir pada saat itu (George 2012). Mewakili Australia, Gillard berkomitmen untuk membantu mewujudkan kesetaraan gender dalam kawasan Kepulauan Pasifik dengan menyediakan dana sebesar \$320 juta selama sepuluh tahun (Mcquillan 2012). Salah

satu tujuan dari pendanaan ini adalah untuk meningkatkan proporsi perempuan dalam peran kepemimpinan dan politik (ibid).

### *3.1.2. Equality of Opportunity: Mendapatkan Kesempatan yang Sama bagi Perempuan dalam Ekonomi dan Pendidikan*

Dalam pilar pertama dalam strategi AusAID yaitu memajukan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang responsif terhadap gender, Australia melihat bahwa terdapat kemajuan dalam mencapai kesetaraan partisipasi pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki. Namun, bagi anak-anak perempuan yang berada di negara terdampak konflik, partisipasi mereka dalam pendidikan masih tertinggal dengan anak laki-laki sehingga diperlukan upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan (ibid). Pendekatan strategi AusAID pada pilar pertama adalah untuk berfokus pada pendidikan anak perempuan di negara yang di mana kesenjangan gender dalam tingkat penyelesaian yang besar, memastikan perempuan memiliki akses yang sama untuk mendapatkan beasiswa (ibid).

Lalu, dalam pilar ke-3 strategi AusAID yang berjudul ‘memberdayakan perempuan secara ekonomi dan meningkatkan keamanan pekerjaan mereka’, Australia melihat sektor perekonomian formal dan informal merupakan hal yang sama penting bagi negara. Dalam sektor informal, Australia melihat jika perempuan mendapatkan akses terhadap pasar, layanan finansial, dan teknologi yang sama dengan laki-laki, pendapatan perempuan dari sektor ini akan meningkat. Sedangkan dalam sektor formal, menghapus hambatan bagi perempuan agar bisa memasuki sektor ini dengan aman dan adil, dapat membantu negara menjadi lebih kompetitif dan memberikan manfaat yang baik bagi perempuan serta keluarga mereka (ibid).

Salah satu pendekatan strategi AusAID pada pilar ke-3 adalah untuk membuka kesempatan kerja bagi perempuan, baik dalam sektor formal maupun informal, dengan bekerja sama dengan pengusaha perempuan terutama, sektor publik dan swasta, serta dengan mendukung pengembangan bisnis (ibid).

Pada saat menghadiri Forum Kepulauan Pasifik ke-43 di Rarotonga, Kepulauan Cook di tahun 2012, Gillard berkomitmen untuk membantu mewujudkan kesetaraan gender dalam kawasan Kepulauan Pasifik dengan menyediakan dana sebesar \$320 juta selama sepuluh tahun, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan melalui akses yang lebih baik ke dalam pasar (Mcquillan 2012). Adapun pada saat yang sama dengan Forum Kepulauan Pasifik ke-43 ini, pada akhir pertemuan, para pemimpin termasuk Gillard, sepakat untuk mendukung 'Deklarasi Pemimpin Kawasan Pasifik untuk Kesetaraan Gender'. Dengan adanya deklarasi ini, para pemimpin kawasan Kepulauan Pasifik berkomitmen untuk mengangkat status perempuan di Kepulauan Pasifik dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial (Pacific Island Forum 2012).

### ***3.1.3. Equality of Legal Rights: Mendapatkan Keadilan dalam Hukum atau Kebijakan***

Dalam pilar ke-3 (terkait ekonomi) strategi AusAID 2011, Australia melihat partisipasi perempuan dalam ekonomi memiliki hambatan. Hambatan ini bisa datang dari kebijakan dan undang-undang yang menangani masalah seperti kepemilikan tanah atau hak waris, yang di mana membatasi perempuan untuk mendapatkan aset, sumber daya, dan peluang yang sama dengan laki-laki (AusAID 2011). Salah satu pendekatan dalam pilar ke-3 strategi AusAID dari segi hukum

adalah untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi perempuan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki melalui peningkatan kebijakan, dan akses ke pelatihan, jalan pedesaan, transportasi, listrik, informasi, dan teknologi digital (ibid). Selain itu, pada pilar ke-4 (terkait kekerasan terhadap perempuan), Australia melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari distribusi kekuasaan yang tidak merata antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga diperburuk oleh tidak berfungsinya undang-undang, kebijakan, dan institusi yang ada dalam menangani pelaku kekerasan, serta dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi penyintas kekerasan (ibid). Salah satu pendekatan dalam pilar ke-4 strategi AusAID untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dari segi hukum adalah untuk bekerja sama dengan pemerintah mitra, guna membantu mengembangkan serta menerapkan undang-undang dan kebijakan yang diperlukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, dan juga meningkatkan akses perempuan ke sistem hukum dan peradilan (ibid).

Selanjutnya, dalam *Australian National Action Plan on Women, Peace, and Security 2012-2018*, yang merupakan bentuk pengimplementasian dari Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 (UNSCR 1325 *on Women, Peace, and Security*), Australia menyatakan telah mendukung pelaksanaan resolusi tersebut, telah menandatangani hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, serta mendukung tindakan internasional yang berhubungan dengan agenda *women, peace, and security*, terutama yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender (FaHCSIA 2012). Dari segi kebijakan, hal ini merupakan langkah maju bagi Australia terkait perannya untuk berkontribusi pada keamanan global. Memasukkan gender ke dalam politik perdamaian dan keamanan, akan menciptakan



kebijakan perdamaian dan keamanan yang lebih baik bagi Australia baik di kawasannya, maupun di panggung global (Lee-koo 2014).

#### *3.1.4. Education and Reform: Menggunakan Pendidikan sebagai Alat Utama dalam Reformasi Sosial*

Terhubung dengan komitmen politik feminisme liberal yang kedua (yaitu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara), feminisme liberal juga melihat pendidikan sebagai alat utama dalam reformasi sosial (Wendell 1987). Dalam pilar pertama strategi AusAID, Australia menyatakan bahwa partisipasi anak perempuan dalam pendidikan masih tertinggal dengan anak laki-laki, terutama di negara yang terdampak konflik (AusAID 2011). Kita dapat melihat bahwa Australia menilai pendidikan merupakan hal yang penting dalam mencapai kesetaraan gender. Hal ini terlihat pada salah satu pendekatan strategi AusAID dalam pilar pertama, yaitu untuk memaksimalkan kesempatan dalam program pendidikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan cara seperti mendukung pengembangan kurikulum yang peka terhadap gender, mengurangi stereotip gender dalam pilihan mata pelajaran, serta berinovasi untuk menjangkau perempuan dan anak perempuan yang terpinggirkan seperti yang miskin, memiliki disabilitas, dan juga mereka yang menjadi minoritas (ibid).

Selanjutnya, dalam pilar ke-4 dalam strategi AusAID, Australia berfokus untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, Australia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan perlu mencakup inisiatif untuk mengatasi penyebab dasar kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (ibid). Salah satu pendekatan strategi AusAID dalam pilar ke-4 ini adalah untuk

bekerja sama dengan laki-laki dan anak laki-laki, organisasi masyarakat, serta pemimpin untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan membantu merubah sikap masyarakat terhadap kekerasan, termasuk melalui sektor pendidikan (ibid).

### 3.1.5. *Nationalism and Masculinity* (Enloe 2014)

Enloe (2014) menyatakan bahwa pada abad ke-21, semangat nasionalis yang maskulin dapat dirasakan melalui politik luar negeri sebuah pemerintahan. Seperti yang dilakukan oleh Tiongkok dalam politik luar negerinya, yang mana tidak hanya digunakan untuk mempertegas kekuasaan China di Tibet saja, namun juga untuk mengklaim Taiwan, serta untuk menegaskan kedaulatan China di Laut China Selatan yang kaya akan minyak (ibid). Dalam konteks pemerintahan sebuah negara, sulit bagi perempuan untuk melakukan pendekatan feminis ke dalam tindakannya, karena hal tersebut merupakan tentang kekuasaan laki-laki (ibid).

Pada tanggal 28 Oktober 2012, pemerintahan Gillard merilis '*Australia in the Asian Century*' *White Paper*. Buku Putih ini dirilis langsung di hadapan media, dan bukan ke parlemen, yang di mana hal ini memberikan sorotan kepada Gillard karena telah inisiatif dalam pembuatan politik luar negeri utama yang tidak dimulai selama masa jabatan Kevin Rudd (Hawksley and Georgeou 2013). Dalam Buku Putih ini, pemerintahan Gillard menyatakan bahwa tujuan dari pembuatan Buku Putih ini adalah untuk mengamankan Australia sebagai negara yang lebih Makmur dan tangguh yang sepenuhnya menjadi bagian dari kawasan Asia serta terbuka untuk dunia (Australian Government 2012). Australia menyatakan bahwa ada banyak peluang selain ekonomi untuk membangun hubungan yang lebih erat di kawasan Asia, seperti melalui hubungan pendidikan, budaya, dan hubungan antar individu (ibid). Australia telah menjalin hubungan yang kuat dengan beberapa

negara di kawasan Asia (China, Jepang, India, Indonesia, dan Korea Selatan). Namun, dalam Buku Putih ini Australia berpendapat bahwa di abad Asia, Australia perlu terlibat lebih dalam dan lebih luas dengan negara-negara Asia (ibid). Australia sendiri melihat kawasan Asia memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan kepada Australia dan begitupun sebaliknya, Australia juga memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada kawasan Asia (ibid). Berangkat dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bagaimana Australia selama pemerintahan Gillard melalui Buku Putih ini memposisikan dirinya sebagai negara yang terbuka untuk bekerja sama. Alih-alih menjadi negara yang mencerminkan maskulinitas seperti menindas, menimbulkan konflik, serta memperbesar hegemoninya pada suatu kawasan (contoh: China) di dalam politik luar negerinya sebagaimana yang dikatakan oleh Enloe (2014), Australia lebih membuka dirinya untuk saling berhubungan baik dengan mengajak negara-negara khususnya di kawasan Asia, untuk memperdalam dan mempererat hubungan mereka.

Pada 25 Juli 2011, Australia di bawah pemerintahan Gillard menandatangani kesepakatan dengan Malaysia yang dikenal sebagai '*Malaysian Solution*', terkait pengiriman serta pemukiman kembali untuk pencari suaka dan pengungsi antara kedua negara (Spinks 2011). Dalam kesepakatan tersebut, Malaysia akan menerima transfer sebanyak 800 pencari suaka dari Australia. Sebagai gantinya, Australia akan memukimkan kembali 4000 pengungsi yang diakui dari Malaysia selama 4 tahun. Perjanjian ini berlaku bagi pencari suaka yang telah melakukan perjalanan atau dicegat oleh pihak berwenang Australia ketika mencoba masuk secara ilegal ke Australia melalui laut setelah tanggal penandatanganan (ibid). Perjanjian ini juga menetapkan bahwa para pencari suaka

dan pengungsi tidak akan dihukum, tetapi mereka akan ditahan di tempat akomodasi transit untuk pemrosesan awal, setelah itu mereka akan dilepaskan ke masyarakat dan menerima dukungan dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*The International Organization for Migration*), namun mereka tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa untuk klaim suaka (ibid). Sebelumnya, kebijakan ini dikritik oleh pimpinan oposisi, Tony Abbott, dengan mengatakan bahwa Australia harus menghentikan kapal-kapal pencari suaka yang datang, serta ia juga menyebutkan kejahatan orang-orang pencari suaka di Australia (Burnside 2011) Sebagai perbandingan, Perdana Menteri Australia yang terpilih pada tahun 2013, Abbott dalam kampanyenya, lebih memilih untuk menghentikan kapal-kapal pencari suaka untuk masuk ke Australia. Hingga Desember 2013, kapal-kapal pencari suaka yang datang ke Australia mulai menjadi lebih sedikit karena pemerintahan Abbott mengembalikan kapal-kapal tersebut ke negara lain (Hasham 2015).

Pada masa pemerintahan Gillard, melalui kerja sama dengan Malaysia, Australia mau menerima pencari suaka dengan syarat pencari suaka harus melakukan beberapa pemrosesan di Malaysia. Disini kita dapat melihat Australia menjadi terbuka terhadap pengungsi dan pencari suaka meskipun dengan beberapa syarat tertentu. Kebijakan ini sebelumnya mendapatkan kritik dari pimpinan oposisi yang tidak ingin menerima pencari suaka di Australia, yang dimana terlihat bagaimana sulitnya bagi perempuan untuk melakukan pendekatan feminis (yang terbuka, adil, serta menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap orang) dalam tindakannya (Enloe 2014). Lalu, pada masa pemerintahan Abbott, Australia menjadi lebih tertutup bagi pencari suaka dengan kebijakannya untuk

menghentikan kapal-kapal pencari suaka berlabuh di Australia. Kebijakan Abbott ini bertentangan dengan kebijakan pencari suaka pada masa pemerintahan Gillard yang mencerminkan nilai feminisme liberal yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sama dan juga semua orang berhak mendapatkan keadilan yang setara (Wendell 1987).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada tahun 2010, Australia menuliskan sejarah baru dengan terpilihnya perempuan pertama sebagai Perdana Menteri Australia, yaitu Julia Gillard. Menggantikan Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri, kisah suksesi Gillard diiringi oleh penggambaran yang kurang baik dari mata media Australia. Sebagai perempuan pertama di Australia yang menjadi Perdana Menteri, Gillard juga mendapatkan tekanan dan serangan baik dari dalam, maupun dari luar Partai Buruh Australia. Masalah personal Gillard juga ikut menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang menentang kebijakannya, terutama dari pimpinan oposisi pada saat itu, Tony Abbott. Abbott terlihat memanfaatkan celah dalam pemerintahan Gillard ini dengan cara seperti menghadiri aksi protes terhadap pemerintahan Gillard yang berisikan spanduk-spanduk dengan kata-kata kasar seperti *juliar* dan lainnya, yang di mana tindakan Abbott ini memperkeruh ketegangan antara keduanya. Ketegangan ini memuncak pada saat Gillard menyampaikan pidato yang menyerang Abbott pada saat di parlemen, pidato tersebut dikenal dengan sebutan '*misogyny speech*'. Pidato tersebut membuka mata internasional terhadap perpolitikan Australia yang mencerminkan maskulinitas.

Di samping adanya tekanan dan serangan berbasis yang berbasis gender dari dalam negeri selama kepemimpinannya, Gillard terlihat mengintegrasikan gender dan nilai-nilai feminisme liberal ke dalam beberapa politik luar negerinya. Menggunakan sudut pandang feminisme liberal yang memiliki komitmen politik yang disampaikan oleh Susan Wendell seperti *Women and Individualism, Equality*

*of Opportunity, Equality of Legal Rights, Education and Reforms*, serta pandangan *Nationalism and Masculinity* dari Cynthia Enloe untuk melihat penerapan nilai-nilai feminisme liberal dalam konteks negara, kita dapat melihat beberapa politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Gillard yang mempromosikan kesetaraan gender dan menerapkan nilai-nilai feminisme liberal di dalamnya. Secara ringkas, penerapan yang dimaksud dirangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Implementasi Feminisme Liberal dalam Politik Luar Negeri Australia**  
**Periode Kepemimpinan PM Julia Gillard Tahun 2010-2013**

<b>Perspektif Feminisme Liberal</b>	<b>Variabel</b>	<b>Kebijakan Luar Negeri</b>
Susan Wendell	Women and Individualism	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjuk duta global untuk perempuan dan anak perempuan (tahun 2011)</li> <li>- AusAID, Pilar ke-2 (tahun 2011)</li> <li>- <i>Australian National Action Plan on Women, Peace, and Security 2012-2018</i> (tahun 2012)</li> <li>- Pemberian dana sebesar \$320 juta pada Forum Kepulauan Pasifik (tahun 2012)</li> </ul>
	Equality of Opportunity	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AusAID, Pilar pertama (tahun 2011)</li> <li>- AusAID, Pilar ke-3 (tahun 2011)</li> <li>- Pemberian dana sebesar \$320 juta pada Forum Kepulauan Pasifik (tahun 2012)</li> <li>- ‘Deklarasi Pemimpin Kawasan Pasifik untuk Kesetaraan Gender’, pada Forum Kepulauan Pasifik (tahun 2012)</li> </ul>
	Equality of Legal Rights	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AusAID, Pilar ke-3 (tahun 2011)</li> <li>- AusAID, Pilar ke-4 (tahun 2011)</li> <li>- <i>Australian National Action Plan on Women, Peace, and Security 2012-2018</i> (tahun 2012)</li> </ul>
	Education and Reforms	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AusAID, Pilar pertama (tahun 2011)</li> <li>- AusAID, Pilar ke-4 (tahun 2011)</li> </ul>
Cynthia Enloe	Nationalism and Masculinity	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘<i>Australia in the Asian Century</i>’ <i>White Paper</i> (tahun 2012)</li> <li>- ‘<i>Malaysian Solution</i>’ (tahun 2011)</li> </ul>

Sumber: Wendell (1987), Enloe (2014)

Penunjukkan duta global untuk perempuan dan anak-anak perempuan pada tahun 2011 memperlihatkan komitmen Australia pada masa kepemimpinan Gillard untuk menjadi yang terdepan dalam upaya untuk mempromosikan peran perempuan dan anak perempuan secara global. Selanjutnya, pada November 2011, salah satu program bantuan Australia, *Australian AID* (AusAID) mengeluarkan strategi tematik dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui program bantuan. Lalu, pada tanggal 8 Maret 2012, pemerintahan Gillard meluncurkan *Australian National Action Plan on Women, Peace, and Security*, yang di mana NAP ini bertujuan untuk mengkonsolidasi upaya pemerintah Australia dalam memasukan perspektif gender ke dalam pembangunan perdamaian dan keamanan, melindungi hak asasi perempuan (khususnya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender), serta mempromosikan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik. Pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2012, Australia menghadiri Forum Kepulauan Pasifik ke-43 di Rarotonga, Kepulauan Cook. Dalam pertemuan tersebut Gillard berkomitmen untuk memberikan bantuan dana sebesar \$320 juta untuk membantu mewujudkan kesetaraan gender dalam kawasan Kepulauan Pasifik. Pada akhir pertemuan, para pemimpin termasuk Gillard, sepakat untuk mendukung ‘Deklarasi Pemimpin Kawasan Pasifik untuk Kesetaraan Gender’, yang di mana para pemimpin berkomitmen untuk mengangkat status perempuan di Kepulauan Pasifik dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial

Dalam Buku Putih yang dirilis pada tahun 2012 dan berjudul ‘*Australia in the Asian Century*’, pemerintahan Gillard menyatakan bahwa tujuan dari pembuatan Buku Putih ini adalah untuk mengamankan Australia sebagai negara



yang lebih Makmur dan tangguh yang sepenuhnya menjadi bagian dari kawasan Asia serta terbuka untuk dunia. Kita dapat melihat disini bahwa Australia pada masa kepemimpinan Gillard memilih untuk menjadi negara yang terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain, khususnya di kawasan Asia, dibandingkan menjadi negara yang menimbulkan konflik dan melakukan penindasan dalam politik luar negerinya. Lalu, Gillard melakukan upaya kerja sama dengan Malaysia dalam menghadapi pencari suaka yang dikenal sebagai *'Malaysian Solution'*. Australia akan menerima pencari suaka, dengan syarat, mereka telah mengikuti beberapa proses dari Malaysia. Dibandingkan dengan kebijakan pencari suaka dari Tony Abbott yang terkesan menutup Australia dari pencari suaka, kebijakan Gillard mencerminkan nilai-nilai feminisme liberal yaitu setiap orang berhak mendapatkan kesempatan, keadilan dan kebijakan yang setara.

Sebagai kesimpulan akhir, penulis melihat bahwa meskipun mendapatkan tekanan dan beberapa serangan yang berbasis gender dari dalam negeri, kita masih bisa melihat bahwa Gillard mempromosikan kesetaraan gender dan menerapkan nilai-nilai feminisme liberal ke dalam beberapa politik luar negerinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran feminisme liberal yang melihat negara sebagai sekutu yang perlu terlibat dalam mengupayakan kesetaraan gender.

#### **4.2 Rekomendasi**

Unsur kesetaraan gender dan perspektif feminisme dalam politik luar negeri sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi. Dalam penelitian ini, penulis telah membahas mengenai feminisme liberal politik luar negeri Australia, dengan studi kasus masa kepemimpinan Julia Gillard 2010-2013. Oleh karena itu, untuk

penelitian selanjutnya diharapkan dapat meninjau lebih dalam terkait hubungan antar negara, dengan menggunakan salah satu dari banyaknya aliran teori feminisme.



## DAFTAR PUSTAKA

- ABC News. 2010. *Foreign policy not my thing, says Gillard*. 5 October. Accessed June 5, 2022. <https://www.abc.net.au/news/2010-10-05/foreign-policy-not-my-thing-says-gillard/2286744>.
- . 2012. *Gillard addresses UN General Assembly*. 27 September. Accessed July 10, 2022. <https://www.abc.net.au/news/2012-09-27/gillard-addresses-un-general-assembly/4282652>.
2015. *The Killing Season - Episode 3*. Directed by Sarah Ferguson. Performed by ABC News. Accessed December 15, 2021. <https://www.abc.net.au/news/programs/killing-season/episode-3/?nw=0>.
- Asian Scientist. 2011. *Julia Gillard Appoints Penny Williams As Global Ambassador For Women And Girls*. 13 September. Accessed June 3, 2022. <https://www.asianscientist.com/2011/09/academia/julia-gillard-australia-government-appoints-penny-williams-global-ambassador-for-women-and-girls-09132011/>.
- AusAID. 2005. *Australia's response to the Indian Ocean Tsunami: REPORT FOR THE PERIOD ENDING 30 JUNE 2005*. Canberra: Australian Government.
- . 2011. *Promoting opportunities for all: Gender equality and women's empowerment*. Canberra: Australian Government.
- Australian Department of Foreign Affairs and Trade. 2011. *Australia appoints global ambassador for women and girls*. 13 September. Accessed June 3, 2022. <https://www.dfat.gov.au/news/news/Pages/australia-appoints-global-ambassador-for-women-and-girls>.
- Australian Government. 2012. *Australia In The Asian Century White Paper*. Canberra: Australian Government.
- Australian Labor Party. 2010. *Speech: Julia Gillard, Opening statement at press conference, Parliament House, Canberra*. 17 July. Accessed December 7, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=tjGnHKe0v5s>.
- Burnside, Julian. 2011. *Refugees: Now we have the Malaysian solution, but what's the problem?* 9 May. Accessed June 16, 2022. <https://theconversation.com/refugees-now-we-have-the-malaysian-solution-but-whats-the-problem-1155>.
- Cassidy, Barrie. 2013. *Is Gillard's number up?* 9 June. Accessed March 31, 2022. <https://www.abc.net.au/news/2013-06-09/cassidy---gillard/4742634>.

- Coggan, Maggie. 2020. *Gender equality in Australia is on the decline. Here's what could fix it.* 5 March. <https://probonoaustralia.com.au/news/2020/03/gender-equality-in-australia-is-on-the-decline-heres-what-could-fix-it/>.
- Commonwealth of Australia. 2012. "Parliamentary Debates, House of Representative Official Hansard." *Parliament of Australia*. 9 October. Accessed December 23, 2021. [https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Hansard/Hansard\\_Display?bid=chamber/hansardr/5a0ebb6b-c6c8-4a92-ac13-219423c2048d/&sid=0039](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Hansard/Hansard_Display?bid=chamber/hansardr/5a0ebb6b-c6c8-4a92-ac13-219423c2048d/&sid=0039).
- Costar, Brian. 2012. "Seventeen Days to Power: Making a minority government." In *Julia 2010 : The Caretaker Election*, by Marian Simms and John Wanna, 357-370. Canberra: ANU E-Press.
- Crawford, Mary, and Barbara Pini. 2010. "The Australian Parliament: A Gendered Organisation." *Parliamentary Affairs* 64 (1): 82-105.
- Curran, Enda. 2012. *Resignation Sparks Australia Leadership Fight*. 23 February. Accessed March 31, 2022. [https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204909104577238391099283650?mod=googlenews\\_wsj](https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204909104577238391099283650?mod=googlenews_wsj).
- Curtin, Jennifer. 2015. "The prime ministership of Julia Gillard." *Australian Journal of Political Science* 50 (1).
- Denemark, David, Ian Ward, and Clive Bean. 2012. "Gender and Leader Effects in the 2010 Australian Election." *Australian Journal of Political Science* 47 (4): 563-578.
- Donaghue, Ngaire. 2015. "Who Gets Played By 'The Gender Card'?" *Australian Feminist Studies* 30 (84): 161-178.
- Enloe, Cynthia. 2014. *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. Second. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
- FaHCSIA. 2012. *Australian National Action Plan on Women, Peace and Security 2012–2018*. Canberra: Australian Government.
- Friedan, Betty. 1977. *The Feminine Mystique*. 10th Anniversary. New York: Dell.
- George, Nicole. 2012. *Women, gender and 'voice' at the Pacific Islands Forum*. 1 September. Accessed June 5, 2022. <https://www.eastasiaforum.org/2012/09/01/women-gender-and-voice-at-the-pacific-islands-forum/>.
- Gillard, Julia. 2014. *My Story*. North Sydney: Random House.

2020. *Global Gender Gap Report*. Geneva: World Economic Forum.
- Griffiths, Emma. 2013. *Kevin Rudd defeats Julia Gillard 57-45 in Labor leadership ballot, paving way for a return to PM*. 26 June. Accessed March 31, 2022. <https://www.abc.net.au/news/specials/rudd-returns/2013-06-26/rudd-prevails-over-gillard-in-leadership-ballot/4783422?nw=0&r=Collection>.
- . 2012. *Rudd confirms he'll contest leadership*. 24 February. Accessed March 31, 2022. <https://www.abc.net.au/news/2012-02-24/rudd-confirms-ballot-nomination/3851086?nw=0&r=HtmlFragment>.
- . 2012. *Rudd pledges loyalty to Gillard after ballot defeat*. 27 February. Accessed March 31, 2022. <https://www.abc.net.au/news/2012-02-27/gillard-wins-leadership-spill/3854204>.
- Hartcher, Peter. 2013. *And the winner is ... Abbott*. 22 March. Accessed March 31, 2022. <https://www.smh.com.au/politics/federal/and-the-winner-is-abbott-20130321-2gizk.html>.
- . 2013. *Rudd supporters move to force leadership vote*. 26 June. Accessed March 31, 2022. <https://www.smh.com.au/politics/federal/rudd-supporters-move-to-force-leadership-vote-20130626-2owgx.html>.
- Hasham, Nicole. 2015. *Did Tony Abbott stop the boats? New analysis casts doubt on claims*. 25 September. Accessed June 16, 2022. <https://www.smh.com.au/politics/federal/did-tony-abbott-stop-the-boats-new-analysis-casts-doubt-on-claims-20150924-gjtwfo.html>.
- Hawksley, Charles, and Nichole Georgeou. 2013. "Issues in Australian Foreign Policy July to December 2012." *Australian Journal of Politics and History* 260-275.
- Holland, Jack, and Katharine A.M. Wright. 2017. "The Double Delegitimation of Julia Gillard: The Double Delegitimation of Julia Gillard:." *Australian Journal of Politics and History* 63 (4): 588-602.
- Holmgren, Linn Egeberg, and Jeff Hearn. 2009. "Framing 'men in feminism': theoretical locations, local contexts and practical passings in men's gender-conscious positionings on gender equality and feminism." *Journal of Gender Studies* 18 (4): 403-418.
- Ireland, Judith. 2012. *PM challenges Rudd to go to backbench if leadership bid fails*. 23 February. Accessed March 31, 2022. <https://www.theage.com.au/politics/federal/pm-challenges-rudd-to-go-to-backbench-if-leadership-bid-fails-20120223-1towu.html>.
- . 2013. *Shorten to back Rudd in leadership ballot*. 26 June. Accessed March 31, 2022. <https://www.smh.com.au/politics/federal/shorten-to-back-rudd-in-leadership-ballot-20130626-2owzy.html>.

- Kefford, Glen. 2013. "The Presidentialisation of Australian Politics? Kevin Rudd's Leadership of the Australian Labor Party." *Australian Journal of Political Science* 48 (2): 135-146.
- Lee-koo, Katrina. 2014. "Implementing Australia's National Action Plan on United Nations Security Council Resolution 1325." *Australian Journal of International Affairs* 68 (3): 300-313.
- Leigh, Andrew. 2000. "Factions and Fractions: A Case Study of Power Politics in the Australian Labor Party." *Australian Journal of Political Science* 35 (3): 427-448.
- Lumsdaine, David. 1993. *Moral Vision in International Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Lumsdaine, David. 1996. "The Intertwining of International and Domestic Politics." *Polity* 29 (2): 299-306.
- Mao, Frances. 2019. *Pemilu Australia: Mengapa politik ibarat racun bagi para perempuan di negeri kanguru*. 19 May. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48318932>.
- Mcquillan, Laura. 2012. *Australia boosts aid for Pacific sex equality*. 30 August. Accessed June 5, 2022. <https://www.pacwip.org/resources/news/australia-boosts-aid-for-pacific-sex-equality/>.
- Nyhagen, Line, and Beatrice Halsaa. 2016. *Religion, Gender and Citizenship. Women of Faith, Gender Equality and Feminism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Pacific Island Forum. 2012. "PACIFIC LEADERS GENDER EQUALITY DECLARATION 30 August 2012, Rarotonga, Cook Islands." *forumsec.org*. 30 August. Accessed June 5, 2022. <https://www.forumsec.org/2012/08/30/pacific-leaders-gender-equality-declaration/>.
- Rimmer, Susan Harris, and Marian Sawyer. 2016. "Neoliberalism and gender equality policy in Australia." *Australian Journal of Political Science*, 51:4 742-758.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Saroha, Dr. J. K. 2019. "A Study on Domestic Politics and International Relations." *International Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology* 6 (2): 14-16.
- Simms, Marian. 2012. "Diary of an Election." In *Julia 2010 : The Caretaker Election*, by Marian Simms and John Wanna, 11-32. Canberra: ANU E-Press.



- Simms, Marian, and John Wanna. 2012. "The Caretaker Election of 2010: 'Julia 10' versus 'Tony 10' and the onset of minority government." In *Julia 2010: The Caretaker Election*, by Marian Simms and John Wanna, 1-7. Canberra: ANU E-Press.
- Skidmore, David, and Valerie M. Hudson. 1993. *The Limits Of State Autonomy: Societal Groups And Foreign Policy Formulation*. Boulder: Westview Press.
- Spinks, Harriet. 2011. *Australia-Malaysia asylum seeker transfer agreement*. 7 July. Accessed June 16, 2022. [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/FlagPost/2011/July/Australia-Malaysia\\_asylum\\_seeker\\_transfer\\_agreement](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2011/July/Australia-Malaysia_asylum_seeker_transfer_agreement).
- Summers, Anne. 2012. "Her Rights at Work: The Political Persecution of Australia's First Female Prime Minister." *The Economic and Labour Relations Review* 23 (4): 115-126.
- The Australian. 2012. *Julia Gillard's father died of shame: Alan Jones*. 29 September. Accessed December 2021, 17. <https://www.theaustralian.com.au/news/julia-gillards-father-died-of-shame-alan-jones/news-story/2d3d6c6b23be51a717691aa43aa69e3a>.
- Tong, Rosmarie. 2014. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. 4th. Boulder, Colorado: Westview Press.
- n.d. *UN Women: Gender Mainstreaming*. <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm>.
- Varney, Denise. 2017. "'Not Now, Not Ever': Julia Gillard and the Performative Power of Affect." In *Performance, Feminism and Affect in Neoliberal Times*, by Elin Diamond, Denise Varney and Candice Amich, 25-38. London: Palgrave Macmillan.
- Wendell, Susan. 1987. "A (Qualified) Defense of Liberal Feminism." *Hypatia* 2 (2): 65-93.
- Williams, Blair. 2017. "A gendered media analysis of the prime ministerial ascension of Gillard and Turnbull: he's 'taken back the reins' and she's 'a backstabbing' murderer." *Australian Journal of Political Science* 1-15.
- Wollstonecraft, Mary. 1792. *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects*. London: Printed for J. Johnson.